



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Pangeran Dipenogoro Nomor 02. Kuala Kurun 74511  
Telepon 05373032846 Email : diskominfosp@gunungmas.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR : 800/223/DKIPS/III/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk dan menetapkan pegawai untuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tentang Standar Harga Barang dan Jasa serta Standar biaya Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
14. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 04 tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022, tanggal 02 Januari 2023;
15. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 533 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu ;

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, yang meliputi :

- a) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
- b) Memonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
- c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi ;
  - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan;
  - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada Tanggal, 26 Maret 2024

**KEPALA DINAS,**



**RUBY HARIS, S.T**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19830507 200604 1 017

**Tembusan di sampaikan kepada Yth. :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR : 800/223/DKIPS/III/2024  
 TANGGAL : 26 Maret 2024  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MASTAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	ROY LERRY SUSANTO, S.T NIP. 19801003 200903 1 002 Penata Tk. I / III.d Perencana	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.16.01.2.01.0002	17.248.122,-
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.16.01.2.01.0003	6.129.282,-
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.16.01.2.01.0004	3.352.200,-
1.	ROY LERRY SUSANTO, S.T NIP. 19801003 200903 1 002 Penata Tk. I / III.d Perencana	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.16.01.2.01.0005	2.315.460,-
			5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01.0006	40.759.260,-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.16.01.2.07.0002	161.250.000,-
2.	KUKUH PRABOWO, S.E NIP. 19881104 202202 1 001 Penata Muda (III/a) Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.16.01.2.05.0002	86.800.000,-
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.16.01.2.05.0009	65.658.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.16.01.2.06.0001	4.999.500,-
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.16.01.2.06.0002	105.251.180,-
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8.000.000,-
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.16.01.2.06.0005	29.985.000,-	
		5. Penyediaan Bahan/Material	2.16.01.2.06.0007	60.157.121,-	

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING	PAGU (Rp)
			6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0008 2.16.01.2.06.0009	9.999.990,- 200.021.600,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.16.01.2.08.0002 2.16.01.2.08.0004	79.393.250,- 318.760.120,-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.16.01.2.07.0001	58.900.000,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.16.2.20.2.21.02.0000	24.995.381
		Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.16.01.2.13.0001	1.000.000
3.	<b>YATIE, SE, M.Si</b> NIP. 19800819 200701 2 004 Penata TK. I / III.d Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.01 2.16.01.2.02.05 2.16.01.2.02.07	4.067.070.819,- 1.651.680,- 30.238.470,-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.16.01.2.03.06	200.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.16.01.2.06.06	11.812.800,-

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING	PAGU (Rp)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.16.01.2.08.0001 2.16.01.2.08.0003	4.840.000,- 67.813.857,-
		Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	2.16.01.2.09.0001	89.938.259,-
4.	<b>EMI JUNIATI, S.T</b> NIP. 19770603 200604 2 021 Pembina / IV.a Kepala Bidang pengelolaan Informasi publik	Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	2.16.02.2.01.0012 2.16.02.2.01.0004	2.211.099.830 ,- 175.439.323,-
5.	<b>EMELIA MARSINTA, S.E</b> NIP. 1971118 200701 2 008 Penata Tingkat I / III.d Pranata Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0005	469.897.395,-

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING	PAGU (Rp)
6.	<b>AGUS SOSILO VEDY, S.T.</b> NIP. 19750830 200803 1 001 Penata Tk.I / III.d Manggala Informatika	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0001	8.458.600,-
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.02.0001	7.114.000,-
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0002	82.559.376,-
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0004	21.867.000,-
7.	<b>RUSDIONO ARIF, A.M.d.</b> NIP. 19751110 200604 1 007 Penata / III/c Analis Kebijakan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.01.0003	3.133.196.807 ,-

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING	PAGU (Rp)
8.	<b>JOHN JEMIARDI, A.Md</b> NIP. 19790929 200604 1 011 Penata Muda TK.I / III/b Analisis Kebijakan	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0010	188.087.330,-
9.	<b>WINGO TAMPUNAN, S.Kom</b> NIP. 19770520 201001 1 016 Penata TK. I / III/d Pranata Komputer	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2.16.03.2.02.0001	35.657.748,-
			2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.0002	40.496.700,-
			3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.16.03.2.02.0003	145.405.360,-
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.0002	62.128.128,-
10.	<b>JOHN FREDRIK ULYSSES, M.T.</b> NIP. 19860115 201503 1 004 Penata / III/c Pranata Komputer	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.16.03.2.02.0007	111.903.709,-
			2. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.16.03.2.02.0008	41.533.572,-
11.	<b>WATIE, S.H.</b> NIP. 19760202 200701 2 017 Penata TK.I / III/d Statitisi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	2.20.02.2.01.0006	59.050.720,-

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING	PAGU (Rp)
12.	<b>PURNAMA, S.Pi</b> NIP. 19740407 200501 1 008 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2.20.02.2.01.0001	89.994.570,-  ,-

**KEPALA DINAS,**



**RUBY HARIS, S.T.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19830507 200604 1 017